

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas kinerja di dalam pemerintahan sangatlah penting dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Menurut Cahyani & Utama (2015) Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seseorang yang diberikan kepercayaan dalam mengelola sumber daya publik dan mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga dalam setiap pengelolaan yang dipercayakan instansi atau organisasi pemerintah semuanya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konsep pemerintahan yang baik akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, maka nilai akuntabilitas sangatlah penting diadopsi dalam mengelola pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, sehingga Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas adalah bentuk

perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Di Dalam instansi pemerintah, akuntabilitas bisanya dapat dibuktikan berupa laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai wujud dari pertanggungjawaban pejabat pemerintahan kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Didalam pembuatan atau penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja secara akurat tertuang dalam Peraturan-Presiden-No.29-Tahun-2014, tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), sebagaimana adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, dapat diyakini mampu meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Di Kabupaten Halmahera Utara, pada tahun 2022 dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, bersama badan pengawas keuangan dan pembangunan BPKP Maluku Utara membantu menyelenggarakan

kegiatan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 30 maret 2022 tersebut dengan harapan agar pemerintah halmahera utara bisa menaikkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi B+ dari nilai sebelumnya B. Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut menjelaskan gambaran serta pengukuran kinerja dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja kabupaten halmahera utara yang perlu dioptimalkan (BPKB, 2022).

Akuntabilitas kinerja pemerinta Menurut (Ali Zakiyudin & Suyanto, 2015) dalam (Syarif et al., 2022) tidak terlepas dari penganggaran. Hal ini berkaitan dengan upaya pengembangan Sumber daya yang memerlukan anggaran dalam pengelolaanya, sehingga dapat memberikan kinerja yang diinginkan rakyat serta akuntabilitas terhadap rakyat dapat tercipta. Olehnya itu dengan adanya ketepatan serta kejelasan sasaran anggaran diperlukan untuk mempermudah pertanggungjawaban atas kegagalan ataupun keberhasilan dalam melakukan tugas organisasi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengelolaan anggaran yang sudah sesuai dengan kejelasan sasaran anggaran, juga sering terdapat berbagai kendala dalam penganggaran ataupun pelaksanaanya, sehingga hal ini diperlukan peran pengendalian akuntansi yang baik. Menurut Ali Zakiyudin & Suyanto (2015) dalam Syarif (2022) Pengendalian akuntansi dilakukan untuk melaksanakan pengujian terhadap sistem perencanaan, sistem pencatatan transaksi dan prosedur monitoring yang didasarkan pada sistem. Dengan penggunaan sistem pengendalian akuntansi, manajemen dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik, mengelola operasi menjadi lebih efektif, mampu memperkirakan biaya dan

profitabilitas dari keberhasilan tertentu, dan mengatasi setiap kasus dan masalah untuk meningkatkan kinerja. selain itu, adanya pengendalian akuntansi memungkinkan instansi pemerintah untuk menilai apakah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektif dalam melayani masyarakat dari instansi pemerintah daerah. Hal tersebut adalah bagian dari indikator kinerja pemerintah daerah. Pencapaian indikator itu adalah capaian yang bisa memajukan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Pratama et al., 2020).

Pengelolaan keuangan daerah belum bisa dikategorikan sempurna dalam pelaksanaannya, masih adanya kendala - kendala yang perlu diperbaiki di dalamnya. Secara khusus terdapat permasalahan akuntansi yang menjadi salah satu kendala teknis bagi pelaksana pengelolaan keuangan daerah dalam situasi tertentu, seperti implementasi standar akuntansi pemerintah yang merupakan kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan pada pengelolaan keuangan Negara saat ini (Nasution, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penerapannya dijadikan sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan berguna agar memenuhi keperluan umum digunakan dalam mengukur akuntabilitas, serta mengevaluasi ketetapan ekonomi, sosial, dan politik yang lebih baik untuk pengguna laporan keuangan serta membantu memenuhi kebutuhan informasi keuangan. Penerapan akuntansi keuangan membantu meningkatkan kemampuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk menyajikan informasi tentang tujuan, fungsi, dan objek pengeluaran (Azhar, Akram, 2015).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah Sistem pelaporan juga sangat dibutuhkan bagi manajemen untuk melihat serta mengelola kinerja

terhadap pelaksanaan anggaran yang telah diputuskan. Sistem pelaporan kinerja sebagai sebuah bentuk pertimbangan kewajiban atau pertanggungjawaban untuk melaporkan semua kegiatan dan sumber daya yang bisa dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah serta syarat-syarat penyajian laporan keuangan organisasi pemerintahan, maka sistem pelaporan keuangan dikatakan baik (Dewata et al., 2020) dalam (Sharif et al., 2022).

Fenomena yang umum terjadi saat ini adalah keterlambatan dalam sistem pelaporan. Hal ini mengakibatkan rumitnya proses realisasi anggaran yang pada akhirnya berdampak pada kinerja yang buruk, dengan demikian agar bisa meninjau serta mengendalikan pekerjaan manajemen diperlukan ketepatan sistem pelaporan saat menerapkan anggaran yang sudah diputuskan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, bahwa di dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan standar akuntansi pemerintah, sebagai faktor yang dapat menentukan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah atau satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). Adapun problem yang sering terjadi di organisasi perangkat daerah diantaranya penyaluran anggaran yang tidak tepat sasaran, standar akuntansi pemerintah yang digunakan belum efektif, sistem pengendalian akuntansi, serta sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja yang masih kurang efisien.

Dengan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah, menghendaki peneliti untuk meneliti kembali situasi didalam organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyangkut dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja didalamnya.

Adapun beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh (Suandi, 2008; Dewi, Widana dan Bagus, 2017; Apriani dan Sri, 2019), menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sebagaimana keterlibatan semua unsur suatu organisasi dalam penyusunan anggaran akan membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Jika sasaran anggaran itu baik maka upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah akan baik begitupun sebaliknya jika sasaran anggaran tidak baik maka tidak akan mencapai visi, misi, tujuan dan rencana dengan baik.

Adapun penelitian yang sama yang dilakukan oleh. (Ariyandani, Lukman, dan Alam, 2020); Kaltsum, & Rohman, 2013), menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Selain sasaran anggaran, Adapun penelitian terdahulu oleh (Ariyandani, Lukman, dan Alam, 2020; Desi 2014; Mutiara 2014), menemukan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya jika variabel pengendalian akuntansi ditingkatkan, maka Akuntabilitas Kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Mariso Kota Makassar juga meningkat. Sebagaimana pengendalian akuntansi merupakan sebuah asumsi bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan (Mulyadi, 2008: 109). Dilihat dari manfaat Pengendalian

Akuntansi itu sendiri, Pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatat.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Kaltsum, dan Rohman, 2013; Kartika dan Sukanto, 2019; Pratama, Agustin dan Taqwa, 2019; Mirasih, 2019), Menemukan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Selain pengendalian akuntansi Adapun pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rusnanda, dan Sukanto, 2019; Herawaty, dan Netty, 2011; Anjarwati, 2012), menemukan bahwa. Menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya pengaruh positif pada sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa Dinas Daerah Kota Surabaya sudah menerapkan penyajian laporan keuangan secara lengkap, informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi, informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus, laporan keuangan dapat diuji dan informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Penerapan sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan akuntabilitas kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun penelitian yang sama dilakukan oleh (Anjarwati 2012; Pratama, dkk, 2019; Yuliyanti, 2014); Kewo, 2014; Agustin, Taqwa, 2022; Kartim, Ponto, dan Saleh, 2021; Anisa, dan Haryanto, 2022), Menemukan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Adapun penelitian lain dari

(Sanusi, Atma Hayat, dan Novika Rosari 2022; Mulya, dan Fauzihardani,2022; Harjaningrum, 2021; Brahmana, Debora 2018). Menemukan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Selain sistem pelaporan Adapun penelitian yang berkaitan dengan pengaruh standar akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah seperti yang dilakukan oleh (Suwandi 2022;, Nugraeni,2015; Jannaini, 2012), menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah, maka akuntabilitas kinerja pemerintah akan semakin baik. Dengan kata lain standar akuntansi pemerintah memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebab adanya rangkaian-rangkaian prosedur yang tersusun dalam rangka mempertanggungjawabkan anggaran. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Mudrikah, Fika, and Karnila Ali,2020; Nur Anggraeni 2015; Dupe, dan Ayem 2019; Arza, Syafitri, dan Meyla, 2021). Menemukan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Dari beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga hal ini perlu dilakukan riset penelitian kembali untuk menguji keterkaitan pengaru yang terjadi antara variabel tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mei Anjarwati, (2012), Meneliti tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. karena penelitian tersebut menemukan hasil yang berbeda dari beberapa penelitian yang ada. Selain itu juga adapun penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh

Sari & Tamsir (2023), yang meneliti Tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan judul : **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?
4. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.
4. Untuk menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja dengan standar akuntansi pemerintah.
2. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan informasi yang faktual serta ilmiah bagi masyarakat luas mengenai akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah dalam setiap penerapannya, juga menjadi tambahan pengetahuan dalam memahami keterkaitan pengaruh akuntabilitas kinerja di dalam organisasi pemerintah, sehingga dapat mengawal setiap kinerja yang dilakukan oleh organisasi pemerintah.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang atau variabel yang sama, yaitu pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja dengan standar akuntansi pemerintah.
2. Bagi mahasiswa manfaat penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi, serta memberikan sumber referensi tambahan dalam pembuatan tugas perkuliahan yang berkaitan dengan akuntansi khususnya mengenai

akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah dalam proses penerapannya..

1.4.3. Manfaat Kebijakan

1. Penelitian ini dapat memberikan pandangan dari sisi akademis mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja OPD sebagai perumusan kebijakan.
2. Penelitian ini dapat memberikan arah kebijakan untuk akuntabilitas kinerja OPD di pemerintahan.